

KAJIAN KOMUNIKATOR POLITIK INDONESIA PERIODE 2009-2014: ANALISIS KOMUNIKASI POLITIK SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Rangga Saptia Mohamad Permana dan Evi Rosfiantika

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: rangga.saptia@unpad.ac.id; evi.rosfiantika@unpad.ac.id

ABSTRAK. Komunikator politik adalah individu atau sekelompok individu yang menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan/aturan/kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi khalayak. Dalam hal ini, presiden termasuk ke dalam salah satu komunikator politik, tepatnya dalam tatanan suprastruktur komunikasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden Indonesia ke-6 yang memegang tampuk pimpinan kepala negara Indonesia selama dua periode kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014). Jadi, bisa dibilang SBY adalah salah satu tokoh komunikator politik di Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis komunikasi politik SBY sebagai salah satu tokoh komunikator politik di Indonesia dengan menggunakan metode studi literatur untuk menggambarkan bagaimana fenomena komunikasi politik yang dilakukan oleh SBY pada periode kedua beliau menjabat sebagai presiden. Hasil menunjukkan bahwa sebagai komunikator politik, SBY termasuk ke dalam golongan politikus, di mana beliau berperan sebagai pemimpin politik negara sekaligus sebagai individu yang termasuk ke dalam sebuah partai (partisan). Gaya komunikasi politik SBY yang normatif seringkali dinilai oleh masyarakat sebagai keragu-raguan, rapuh, dan tidak tegas. Terbukti dengan friksi internal di dalam partai koalisi yang dipimpinnya saat itu (Partai Demokrat), dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pengambil berbagai keputusan kontroversial yang bersebrangan dengan partai koalisi, di mana SBY tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKS sebagai partai koalisi yang bercitarasa oposisi. Di balik berbagai anggapan negatif terhadap gaya komunikasi politiknya pada saat itu, ternyata SBY pun pernah dianugerahi *Gold Standar Awards* pada tahun 2010 oleh Public Policy Affairs sebagai Komunikator Politik Terbaik 2010. Ini merupakan salah satu penghargaan dari dunia internasional terhadap kinerja SBY dalam memimpin Indonesia.

Kata kunci: Komunikasi politik; komunikator politik; Indonesia; Susilo Bambang Yudhoyono; 2009-2014

STUDY OF INDONESIAN POLITICAL COMMUNICATORS FOR THE PERIOD 2009-2014: ANALYSIS OF SUSILO BAMBANG YUDHOYONO'S POLITICAL COMMUNICATION

ABSTRACT. Political communicators are individuals or groups who convey messages related to power and government policies/rules/authorities that aim to influence audiences. In this case, the president is included as one of the political communicators, precisely in the communication superstructure. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) is the sixth president of Indonesia who held the reins of the head of state of Indonesia for two terms of leadership (2004-2009 and 2009-2014). So, it could be said that SBY is one of the prominent political communicators in Indonesia. This article aims to analyze SBY's political communication as one of the leading political communicators in Indonesia by using the literature study method to describe how the phenomenon of political communication carried out by SBY in his second term as president. The results show that as a political communicator, SBY belongs to the politician group, where he acts as a political leader of the state and an individual belonging to a party (partisan). The public often judges SBY's normative political communication style as doubtful, fragile, and indecisive. It is evidenced by internal friction within the coalition party he led at that time (Partai Demokrat), with the Partai Keadilan Sejahtera (PKS) as the maker of various controversial decisions that were at odds with the coalition party, where SBY did not take firm action against PKS as a coalition party with an oppositional flavor. Behind various negative assumptions about his political communication style at the time, it turned out that SBY had also been awarded the Gold Standard Awards in 2010 by Public Policy Affairs as the Best Political Communicator 2010. It is one of the awards from the international community for SBY's performance in leading Indonesia.

Keywords: Political communication; political communicator; Indonesia; Susilo Bambang Yudhoyono; 2009-2014

PENDAHULUAN

Dalam komunikasi politik, yang dimaksud dengan komunikator politik adalah individu-individu yang menduduki struktur kekuasaan, individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga-lembaga pengelola media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara (Harun & AP., 2006: 11). Singkatnya, komunikator politik adalah individu atau sekelompok

individu yang menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan/aturan/kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk memengaruhi khalayak.

Dan Nimmo membagi komunikator politik menjadi 3 jenis, yakni politikus, profesional, dan aktivis. Politikus adalah individu yang memegang jabatan pemerintah (baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif). Politikus ini memiliki pengaruh terhadap alokasi ganjaran, bisa menuntun/mencegah perubahan sosial, dan bisa memengaruhi pembentukan opini publik di masyarakat. Politikus sendiri terbagi

menjadi dua, yakni partisan dan ideolog. Partisan adalah anggota dari sebuah partai politik, sedangkan ideolog adalah orang yang berpikir; “menjual” idenya untuk masa depan bangsa dan negara.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden Indonesia ke-6 yang memegang tampuk kekuasaan di Indonesia selama dua periode kepemimpinan (2004-2009 dan 2009-2014). Sebagai pemegang tampuk kekuasaan eksekutif di republik ini, tentu SBY sering mengeluarkan pesan-pesan yang berisi tentang kekuasaan dan kebijakan negara. Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa (Harun & AP., 2006: 11). Jadi, bisa dibilang SBY adalah salah satu tokoh komunikator politik di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis akan mencoba untuk membahas komunikasi politik SBY sebagai salah satu tokoh komunikator politik di Indonesia, sebagai tujuan kajian utama dalam artikel ini.

METODE

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan SBY dan gaya komunikasi politiknya dalam periode kedua kepemimpinannya sebagai presiden di Indonesia, yakni dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan serangkaian buku dan jurnal yang berkaitan dengan suatu masalah atau tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009: 80). Peneliti memfokuskan pembahasan komunikasi politik SBY berdasarkan konsep-konsep mengenai komunikator politik dalam buku Dan Nimmo (2005) dan buku karya Harun dan Sumarno (2006). Selain buku-buku tersebut, peneliti juga mengambil contoh kasus yang dipublikasikan di beberapa portal media daring, di antaranya dari portal berita kontan.co.id dan Koran Demokrasi Indonesia. Peneliti mengutip contoh-contoh kasus yang bersumber dari portal-portal tersebut untuk kemudian dibahas dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi politik yang tercantum dalam kedua buku yang telah disebutkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi politik yaitu komunikator politik yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, dan mengendalikan lalu-lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijaksanaan komunikasi nasional. SBY menduduki jabatan eksekutif sebagai presiden di Indonesia.

Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi (kepala negara) sekaligus berperan sebagai kepala pemerintahan di negara yang menganut sistem Presidensial seperti Indonesia. Jadi otomatis, SBY adalah seorang komunikator politik.

Seorang komunikator politik dituntut memiliki berbagai persyaratan yang harus ia penuhi agar menjadi seorang komunikator politik yang handal. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud (Harun & AP., 2006: 11) yaitu: (1) Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan; (2) Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung; (3) Berorientasi kepada negara; (4) Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelegence*); dan (5) Jauh dari sikap hipokrit.

Apakah SBY memiliki persyaratan-persyaratan tersebut? Penulis berpendapat bahwa secara intelegensi, SBY adalah orang yang cerdas dan memiliki berbagai persyaratan di atas. Selama masa kepemimpinannya, SBY sudah cukup baik menjadi seorang komunikator politik di Indonesia dengan pertimbangan, formalitas, dan kesantunannya, setidaknya hingga awal periode masa kepemimpinannya yang kedua. Hal ini cukup terbukti pada tahun 2010 ketika beliau mendapatkan penghargaan *Gold Standard Awards 2010* untuk kategori Komunikasi Politik (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia KJRI Hong Kong, 2011), (Fahmi, 2010), (Indonesian Children, 2010). SBY terpilih oleh panel praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam The Public Affairs Asia, 4 Februari 2010 di Gedung Press Foreign Correspondence Club, Hongkong. *Gold Standar Awards* adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Public Policy Affairs (PPA). PPA adalah lembaga penerbitan global yang menerbitkan berbagai media, analisis, dan intelegensi pasar yang berpusat di Hongkong. Menurut Mark O. Brien, *Vice-President Public Affairs Asia* Asia Pasifik, SBY yang dinominasikan oleh Hans Vriens of Vriens & Partners saat itu mampu menyisihkan nominator lain, karena dinilai berhasil mengkomunikasikan berbagai kebijakan dalam dan luar negeri secara efektif sehingga terpilih kembali sebagai Presiden RI dan kini melanjutkannya pada periode kedua. Catatan panel juga menyebutkan SBY dinilai berhasil menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendorong pemberantasan korupsi pada pemerintahan yang pada saat yang sama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 4 persen, memperkuat spirit ASEAN, dan mendorong lingkungan iklim ekonomi dan politik yang kondusif di dalam negeri.

Namun, pada periode kedua masa kepemimpinannya, citra SBY terpuruk oleh berbagai

kasus politik yang menimpa partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat. Berbagai hal yang negatif tentang SBY seringkali terekspos secara rutin di mata masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi karena dunia informasi dan kehidupan politik sedang tidak sehat. Karena paparan media dan lawan politik SBY pada saat itu sepertinya tengah berusaha untuk membentuk opini negatif tentang presiden, sehingga berita yang mendominasi adalah citra buruk sedangkan hal positif yang ada dalam pemerintah atau SBY jarang sekali diangkat. Kecuali oleh pendukungnya, itupun jarang sekali diliput atau diungkap oleh media massa. Citra sendiri adalah total persepsi terhadap suatu obyek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu (Sutisna & Pawitra, 2001: 83). Karena itu, citra mengandung seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu obyek (Kotler & Armstrong, 1997: 259).

Kadang, komunikasi politik SBY terlihat begitu normatif, bahwa semua tindakannya terukur, terarah, terkendali, *predictable*, dan sesuai dengan yang ada dalam bayangan kita. Semuanya terlihat berjalan baik-baik saja. Pada saat yang lain, tindakan SBY yang sering maju-mundur itu mengomunikasikan bahwa beliau sendiri pun tak tahu cara untuk mengatasi kekuatan politik lain yang dirangkulnya sendiri sehingga tak bisa membangun gaya kepemimpinan sesuai dengan karakter personalnya. Kombinasi dua hal yang bertentangan ini menjadikan gaya komunikasi politik SBY cukup sulit dipahami oleh khalayak.

Peneliti juga melihat bahwa SBY seringkali terlihat rapuh dan tidak tegas dalam mengambil tindakan, bahkan untuk kelanjutan dan citra diri dari karirnya serta koalisi partai yang diusungnya. Hal ini tercermin dari keseimbangan sikap beliau dalam mengambil keputusan terkait dengan keputusan-keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang termasuk ke dalam partai koalisi yang cenderung bersebrangan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh partai koalisi sendiri.

Dikutip dari informasi yang bersumber dari Rosit (2009), Fraksi PKS membuat beberapa keputusan menentang koalisi. Pertama, pada tanggal 4 Maret 2010, Fraksi PKS memilih Opsi C, memberikan dana keringanan kepada Bank Century dan menentukan kewenangan penyidikan Century untuk mendistribusikan dugaan pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, PKS membuat keputusan kontroversial oleh koalisi yang dimaksudkan untuk mempertahankan posisi koalisi. Kedua, pada 24 Januari 2011, saat pengambilan angket kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, PKS menyetujui penyelidikan kasus tersebut, sedangkan koalisi menentang. Ketiga, dalam rapat paripurna hak angket mafia pajak tanggal 22 Februari 2011,

PKS kembali menerima usulan hak angket mafia pajak, namun mayoritas partai koalisi, kecuali Fraksi Golkar, menyatakan penolakannya. Keempat, pada 18 Oktober 2011, PKS mengancam akan mundur dari koalisi jika Suharna, salah satu kadernya yang pernah menjabat sebagai ajudan presiden, dipecat dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi. Dan kelima, PKS memutuskan dalam rapat paripurna DPR saat itu untuk menentang koalisi untuk BBM bersubsidi lagi. PKS menunjukkan sikap ambigu karena partai koalisi harus patuh pada kebijakan SBY-Boediono.

Robert F. Gales dalam Nimmo (2005: 44) menyatakan bahwa terdapat dua tipe peran kepemimpinan, yakni spesialis tugas dan spesialis emosional, atau satu orang bisa memainkan kedua peran itu. Baik kepemimpinan tugas maupun emosional pada hakikatnya tidak lebih unggul. Semuanya tergantung pada situasinya. Jika situasi yang berkembang menguntungkan sang pemimpin, di mana ia memiliki tujuan kelompok yang jelas, disenangi pengikutnya, dan iklim dalam organisasi berjalan harmonis, sang pemimpin dapat memusatkan perhatiannya pada tugas. Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, di mana pemimpin merasa tidak diakui, pengikutnya bertindak bersebrangan dan mengancam keberadaan pemimpin, pemimpin yang berorientasi pada tugas cenderung tetap berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan pemimpin emosional cenderung untuk memperbaiki hubungan interpersonal.

Dari sikap PKS yang sering mengambil jalan bersebrangan dari partai koalisi itu menunjukkan bahwa bangunan koalisi partai pemerintah pada saat itu cenderung keropos dan rapuh. Terbukti, SBY sebagai ketua umum partai koalisi kurang bisa bersikap tegas. SBY yang semestinya memiliki konsistensi baik sebagai ketua umum koalisi maupun sebagai pemimpin negeri ini, tidak menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang berani mengambil sikap secara tegas meskipun beresiko. Sikap PKS merupakan cermin dari kepemimpinan SBY yang lemah dan kurang disegani baik oleh kawan maupun lawan.

Berkaitan dengan kedua tipe pemimpin dari Gales di atas, ada baiknya SBY tetap berusaha untuk berorientasi kepada tugasnya sebagai pemimpin dan mengambil tindakan yang tegas. Daripada PKS menjadi duri dalam daging di koalisi, dan selalu saja bersikap kontroversial, SBY seharusnya sudah mengambil sikap untuk mengeluarkan PKS dari partai koalisi. Tapi yang terjadi, SBY seakan terus diliputi keraguan dan mengedepankan sisi emosionalnya. Hal inilah yang membuat PKS selalu bersikap mendua, yakni masuk ke dalam koalisi tapi cenderung bertindak sebagai partai oposisi. Seharusnya PKS diberi sanksi tegas meskipun tak

dikeluarkan dari partai koalisi. Hal ini menjadi penting agar koalisi yang dibangun selama ini tidak menjadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut. Terkesan ada kepura-puraan koalisi yang selama ini dibentuk, padahal tujuan koalisi adalah untuk menyatukan visi dan misi untuk mendukung kebijakan pemerintah sampai pada Pemilu 2014.

Kasus lainnya selain hubungan SBY dengan PKS adalah ketika beliau harus mengambil sikap terkait dengan kasus yang menimpa ketua umum Partai Demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, yang membuat kondisi internal Partai Demokrat bergejolak. Pada akhirnya, SBY melakukan konfirmasi berupa pidato (8/2/2013) untuk menanggulangi kegalauan politik yang mendera Partai Demokrat. Pidato tersebut memang menjawab kegalauan politik yang melanda Partai Demokrat. Namun melahirkan keberlanjutan spekulasi politik yaitu pertama, SBY mengambil alih secara halus tongkat kendali Partai Demokrat. Kedua, dengan peran tersebut SBY mempersilahkan Anas Urbaningrum untuk fokus terhadap masalah hukum yang dihadapi. Ketiga, SBY melakukan *political judgement* terhadap Anas (Gunawan, 2013).

Pada pidatonya tersebut, SBY mengungkapkan secara halus, sebaiknya Anas mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Demokrat saat itu. Tentunya SBY tahu bahwa mekanisme penggantian ketua umum harus sesuai dengan konstitusi partai, sehingga SBY tidak memecat Anas, melainkan mengambil sebagian peran ketua umum. Daniel Katz, dalam Nimmo (2005: 30) menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah; “memengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian”. Dalam kewenangannya yang pertama, politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok atau langganan; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan/atau melindungi tujuan kepentingan politik; artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sesuai dengan pernyataan Katz tersebut, dalam konteks komunikasi politik SBY yang tertuang dalam pidatonya, beliau berperan sebagai politikus yang bertindak sebagai wakil suatu kelompok, dalam hal ini sebagai wakil dari Partai Demokrat. Pesan-pesan politik yang disampaikan pun bertujuan untuk melindungi kepentingan kelompoknya, yakni demi meredakan konflik yang mendera Partai Demokrat. Dalam konteks internal Partai Demokrat ini, SBY memposisikan dirinya bukan sebagai pemimpin politik Indonesia, tetapi sebagai komunikator politik (politikus) yang menjadi wakil Partai Demokrat dan berkomunikasi dengan tujuan untuk melindungi kelangsungan hidup Partai Demokrat pada saat itu.

SIMPULAN

SBY adalah salah satu tokoh komunikator politik di Indonesia. Selain sebagai pemegang tampuk kepemimpinan Presiden Indonesia (menduduki jabatan eksekutif), beliau juga adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam Partai Demokrat, partai yang dibentuknya dan mengantarkannya ke kursi presiden dalam dua periode kepemimpinan, 2004-2009 dan 2009-2014.

Sebagai komunikator politik, SBY termasuk ke dalam golongan politikus, di mana beliau berperan sebagai pemimpin politik negara sekaligus sebagai individu yang termasuk ke dalam sebuah partai (partisan). Gaya komunikasi politik SBY yang normatif seringkali dinilai oleh masyarakat sebagai keragu-raguan, rapuh, dan tidak tegas. Terbukti dengan friksi internal di dalam partai koalisi yang dipimpinnya, dengan PKS sebagai pengambil berbagai keputusan kontroversial yang bersebrangan dengan partai koalisi, di mana SBY tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKS sebagai partai koalisi yang bercitarasa oposisi.

Di balik berbagai anggapan negatif terhadap gaya komunikasi politiknya pada saat itu, ternyata SBY pun pernah dianugerahi *Gold Standar Awards* pada tahun 2010 oleh Public Policy Affairs sebagai Komunikator Politik Terbaik 2010. Ini merupakan salah satu penghargaan dari dunia internasional terhadap kinerja SBY dalam memimpin Indonesia. Seorang komunikator politik tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk SBY. Di balik berbagai anggapan positif dan negatif yang beliau terima, beliau tetaplah seorang pemimpin Indonesia yang memegang jabatan eksekutif dalam dua periode kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia KJRI Hong Kong. (2011). KPK Raih The Gold Standard Awards 2010 dari Public Affairs Asia di Hong Kong. Diambil 7 Agustus 2022, dari <https://indonesiaproud.wordpress.com/2011/01/25/kpk-raih-the-gold-standard-awards-2010-dari-public-affairs-asia-hong-kong/>
- Fahmi, W. (2010). Yudhoyono Dianugerahi Penghargaan Emas Komunikasi Politik. Diambil 7 Agustus 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/223668/yudhoyono-dianugerahi-penghargaan-emas-komunikasi-politik>

- Gunawan, H. (2013). Ini Awal Perseteruan Anas dengan SBY dan Nazar. Diambil 7 Agustus 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-awal-perseteruan-anas-dengan-sby-dan-nazar>
- Harun, R., & AP., S. (2006). *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju.
- Indonesian Children. (2010). SBY memperoleh penghargaan Komunikator Politik Terbaik Dunia. Diambil 7 Agustus 2022, dari <https://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2010/02/05/sby-memperoleh-penghargaan-komunikator-politik-terbaik-dunia/>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (1997). *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Prenhalindo.
- Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rosit, M. (2009). Gaya SBY Versus PKS. Diambil 7 Agustus 2022, dari <https://rosit.wordpress.com/2012/06/09/gaya-sby-versus-pks/>
- Sutisna, & Pawitra, T. (2001). *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.